

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN (672995)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2025

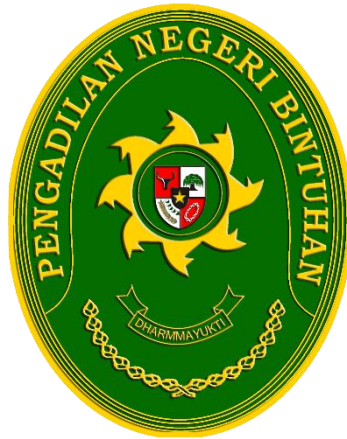


Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kab. Kaur

Bintuhan - Bengkulu

Telp. (0739) 6180035 Fax. (0739) 6180034

e-mail : pnbhn@pn-bintuhan.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pengadilan - Padang Kempas Kab. Kaur

Telp. (0739) 6180035 Fax. (0739) 6180034

Bintuhan - Bengkulu

e-mail : pnbhn@pn-bintuhan.go.id

KATA PENGANTAR

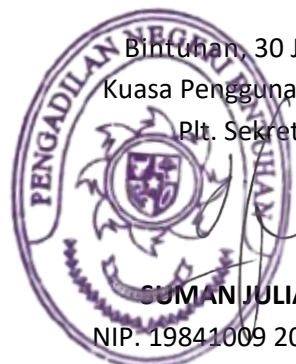
Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bintuhan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bintuhan, 30 Juni 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,

SUMAN JULIAN, S.E.
NIP. 19841009 201501 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum	22
A.1. Dasar Hukum	22
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bintuhan	23
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
A.4. Basis Akuntansi.....	24
A.5. Dasar Pengukuran	25
A.6. Kebijakan Akuntansi	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja.....	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	35
C.1. Aset Lancar	35
C.2 Ekuitas.....	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	37
D.2. Beban Persediaan.....	37
D.3. Beban Barang dan Jasa.....	38
D.4. Beban Pemeliharaan	38

D.5.	Beban Perjalanan Dinas	39
D.6.	Kegiatan Non Operasional.....	39
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
E.1.	Ekuitas Awal	39
E.2.	Surplus (defisit) LO	40
E.3.	Transaksi Antar Entitas.....	40
E.3.	Ekuitas Akhir.....	40
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	40
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	40
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	40

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2024	33
Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2025 dan 2024	33
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025	34
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023.....	34
Tabel 5 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024	35
Tabel 6 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024.....	35
Tabel 7 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	36
Tabel 8 Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.....	36

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

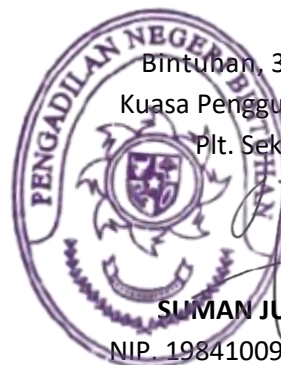
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN**

Jalan Pengadilan-Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu 38963, www.pn-bintuhan.go.id, pnbhn@pn-bintuhan.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bintuhan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bintuhan, 30 Juni 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,
SUMAN JULIAN, S.E.
NIP. 19841009 201501 1 002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Semester 1 Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1,703,500.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 21,798,160 atau mencapai 28,49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 76,515,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2025 dan 2024.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 1,703,500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 29,278,806, sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (27,575,306). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp. 0 dan surplus (defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (27,575,306).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 2,492,200 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (27,575,306) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 23,194,306 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp. (1,888,800).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2025, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2025			TA 2024
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	1,703,500	(49,149)	3,350,000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	1,703,500	(49,149)	3,350,000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	76,515,000	21,798,160	28,49	26,505,900
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		76,515,000	23,501,660	39,01	29,855,900

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
NERACA
PER 30 JUNI 2025 DAN 30 JUNI 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	5,000,000	0
Persediaan	C.1. 2.	709,300	2,492,200
Jumlah Aset Lancar		5,783,300	2,492,200
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		5,783,300	2,492,200
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	5,000,000	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	2.	2,598,100	0
Utang kepada Pihak Ketiga	3.	74,000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		7,672,100	0
Jumlah Kewajiban		7,672,100	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6	(1,888,800)	2,492,200
Jumlah Ekuitas Dana		(1,888,800)	2,492,200
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		(1,888,800)	2,492,200

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	1,703,500	3,350,000
Jumlah Pendapatan		1,703,500	3,350,000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	
Beban Persediaan	D. 3	8,857,246	4,608,155
Beban Barang dan Jasa	D. 4	20,421,560	7,410,100
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	0	6,820,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		29,278,806	28,838,255
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(27,575,306)	(25,488,255)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa			
	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(27,575,306)	(25,488,255)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Ekuitas Awal	E. 1	2,492,200	667,400
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(27,575,306)	(25,488,255)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	23,194,306	25,814,155
Ekuitas Akhir		(1,888,800)	993,300

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bintuhan

Visi Pengadilan Negeri Bintuhan adalah “Terwujudnya Peradilan Umum Yang Agung” .

Misi Pengadilan Negeri Bintuhan adalah

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dan Modul Aset (ASET-BMN). Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul ASET adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode 30 Juni 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan adalah sebagai berikut :

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp. 1,703,500*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 1,703,500. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bintuhan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	0	0
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	0	0
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,703,500	(49,149)
Total Pendapatan		0	1,703,500	(49,149)

Perbandingan realisasi PNBP TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	0	0	0
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	0	0	0
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,703,500	3,350,000	(1,646,500)	(49.149)
Total Pendapatan		1,703,500	3,350,000	(1,646,500)	(49.149)

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara :
Rp. 21,798,160*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Bintuhan per 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp. 21,798,160 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 0 % dari anggaran senilai Rp. 0. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September TA 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	76,515,000	21,798,160	28,49
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	76,515,000	21,798,160	28,49
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	76,515,000	21,798,160	28,49

Perbandingan realisasi belanja TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	21,798,160	26,505,900	(4,707,740)	(17,76)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	21,798,160	26,505,900	(4,707,740)	(17,76)

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang :
Rp. 21,798,160*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Bintuhan per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 21,798,160 dan Rp26,505,900.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	6,410,000	3,320,000	3,090,000	48,20
Belanja Barang Operasional	451,560	1,590,100	(1,138,540)	(71,60)
Belanja Jasa	11,500,000	2,500,000	9,000,000	78,28
Belanja Perjalanan Dinas	0	6,820,000	(6,820,000)	(100)
Belanja Barang Persediaan	3,436,600	2,275,800	1,160,800	33,77
Total Belanja Brutto	21,798,160	26,505,900	4,707,740	17,76
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Total Belanja Netto	21,798,160	26,505,900	4,707,740	17,76

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp 5,783,300

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 5,783,300 dan Rp. 2,492,200.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Bintuhan per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 6 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	5,000,000	0
2. Kas Lainnya dan Setara Kas	74,000	0
3. Persediaan	709,300	2,492,200
Total Aset Lancar	5,783,300	2,492,200

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 5,000,000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 7 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1.	Uang di Brankas	5,000,000	0
2.	Kuitansi yang belum di SP2D kan		0
Jumlah		5,000,000	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan: Rp
709,300*

Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 709,300 dan Rp. 2,492,200. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran dalam pelayanan masyarakat.

Rincian Persediaan periode 30 Juni tahun anggaran 2025 dan 30 Juni tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Barang Konsumsi	709,300	2,492,200
2.	Bahan untuk pemeliharaan	0	0
Total		709,300	2,492,200

C.2 Ekuitas

*Ekuitas :
Rp. 2,492,200*

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,492,200 dan Rp. 667,400. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.
1,703,500*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 1,703,500 dan Rp. 3,350,000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Periode 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat dibawah Tangan	0	0	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	0	0
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	0	0
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,703,500	100
Total Pendapatan		0	1,703,500	100

D.2. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp. 8,857,246*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 8,857,246 dan Rp. 4,608,155. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan Periode 30 Juni 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	8,857,246	4,608,155	4,249,091	(92,20)
Total Beban Persediaan	8,857,246	4,608,155	4,249,091	(92,20)

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 20,421,560 dan Rp. 17,410,100. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Beban barang
& Jasa :
Rp. 20,421,560*

Tabel 39 Rincian Beban Jasa Periode 30 Juni 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	451,560	1,590,100	(1,138,540)	(71,60)
Beban Bahan	6,410,000	3,320,000	3,090,000	48,20
Beban Jasa Konsultan	11,500,000	12,500,000	1,000,000	8
Total Beban Jasa	20,421,560	17,410,100	10,579,840	15,4

D.4. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan Periode 30 Juni 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp. 0*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 6,820,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan biasa	0	0		
Beban Perjalanan dinas dalam kota	0	6,820,000	(6,820,000)	(100)
Total Beban Perjalanan Dinas	0	6,820,000	6,820,000	(100)

D.6. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 0.*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
Periode 30 Juni 2025 dan TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,492,200 dan Rp. 667,400.

E.2.Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. (27,575,306) dan Rp. (25,488,255) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 23,194,306 dan Rp. 25,814,155.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.3.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. (1,888,800) dan Rp. 993,300.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Selama periode 30 Juni tahun 2025 tidak terdapat belanja secara akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bintuhan adalah :

1. BRI Virtual Account 653246729941000 a.n. BPG 121 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN yang digunakan sebagai penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0.

Nomor Surat Izin: S-2732/WPB.12/KP.06/2020 Tanggal 16 Oktober 2020.

2. BRI Virtual Account 654446729951000 a.n. BPg 121 PN Bintuhan yang digunakan sebagai penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0.

Nomor Surat Izin: S-153/WPB.12/KP.06/2022 Tanggal 21 Januari 2022.

3. BRI UNIT BANDAR BINTUHAN A/C 5684.01.000089.30.4 a.n. RPL 121 PN BINTUHAN yang digunakan sebagai penampung Biaya Perkara dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 74,000.

Nomor Surat Izin: S-4880/MK.5/2015 Tanggal 10 Juni 2015.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu sebesar Rp 1,049,000.
2. Biaya Eksekusi yaitu sebesar Rp. 0.

F.2.5. Revisi DIPA

Telah dilaksanakan 6 kali revisi DIPA sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Adapun rincian Revisi DIPA sebagai berikut:

1. Revisi Ke-1 tertanggal 14 Februari 2024 tentang Revisi penyesuaian anggaran MA RI TA 2025.
2. Revisi Ke-2 tertanggal 28 Februari 2025 tentang Permohonan persetujuan izin revisi Halaman III DIPA.
3. Revisi Ke-3 tertanggal 14 Maret 2025 tentang Revisi buka blokir MA RI TA 2025.
4. Revisi Ke-4 tertanggal 17 April 2025 tentang Permohonan persetujuan izin revisi Halaman III DIPA.
5. Revisi Ke-5 tertanggal 16 Mei 2025 tentang Permohonan persetujuan izin revisi Halaman III DIPA.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Belum terdapat ralat PNPB, SPM, SP2D, SSBP dan SSPB sampai dengan 30 Juni 2025.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang perlu dipaparkan dalam laporan keuangan ini.

LAPORAN PENDUKUNG

**DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA WILAYAH BENGKULU
PER 30 JUNI 2025**

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IJIN	SALDO
1	Pengadilan Negeri Bintuhan	005	01	Virtual	653246729941000	BPG 121 Pengadilan Negeri Bintuhan	BRI	S-2732/WPB.12/KP.06/2020 16-10- 2020	0
2	Pengadilan Negeri Bintuhan	005	04	Virtual	654446729951000	BPg 121 PN Bintuhan	BRI	S-153/ WPB.12/ KP.06/ 2021 21-01-2021	0

Bintuhan, Juli 2025
Plt. Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan



Suman Julian, S.E.
NIP. 198410092015011002

INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN (672994)
Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901xxxxxx304)
Virtual Account : 653246729941000 | BPG 121 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
Periode : 01-06-2025 s/d 30-06-2025

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-06-04	14:31:27	40198632	From 032901003295305 to 653246729941000 SETORAN_65324_6729941000 259991310027218000001 dari 032901003295305	0,00	0,00	40.942.469,00	40.942.469,00	SPAN	
2025-06-05	09:56:32	40222478	From 032901003295305 to 653246729941000 SETORAN_65324_6729941000 259991310028054000001 dari 032901003295305	40.942.469,00	0,00	3.676.500,00	44.618.969,00	SPAN	
2025-06-05	13:55:28	40240738	nurul fializah	44.618.969,00	44.618.969,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2025-06-18	14:46:34	40545863	From 653246729941000 to 653246729941000 SETORAN_65324_6729941000 653246729941000 dari 653246729941000	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	BRIVA	
2025-06-20	12:02:35	40606336	From 032901003295305 to 653246729941000 SETORAN_65324_6729941000 259991310094335000001 dari 032901003295305	2.450.000,00	0,00	37.106.200,00	39.556.200,00	SPAN	
2025-06-24	13:53:02	40707012	From 653246729941000 to 653246729941000 SETORAN_65324_6729941000 653246729941000 dari 653246729941000	39.556.200,00	0,00	3.381.000,00	42.937.200,00	BRIVA	
2025-06-25	13:40:41	40745661	nurul fializah	42.937.200,00	42.937.200,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		87.556.169,00	87.556.169,00			
			Saldo Akhir				0,00		



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM (03)
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN (672995)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILUM O (023001xxxxxx304)
Virtual Account : 654446729951000 | BPg 121 PN BINTUHAN
Periode : 01-06-2025 s/d 30-06-2025

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-06-02	14:04:10	40120061	nurul fializah	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2025-06-04	14:31:27	40198634	From 032901003295305 to 654446729951000 SETORAN_65444_6729951000 259991310027221000001 dari 032901003295305	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	SPAN	
2025-06-05	13:53:13	40240578	nurul fializah	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		6.660.000,00	3.450.000,00			
			Saldo Akhir				0,00		

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA WILAYAH BENGKULU
PERIODE 30 JUNI 2025

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IJIN	SALDO REK. KORAN
1	Pengadilan Negeri Bintuhan	005	01		N	I	H	I	L

Bintuhan, Juli 2025
 Plt. Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan

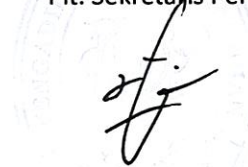

 Surman Julian, S.E.
 NIP. 198410092015011002

DAFTAR REKENING LAINNYA SATUAN KERJA PADA PENGADILAN AGAMA WILAYAH BENGKULU
PERIODE 30 JUNI 2025

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK/KANTOR POS	NOMOR SURAT IJIN	SALDO REKENING KORAN
1	Pengadilan Negeri Bintuhan	005	04	Giro	5684.01.000089.30.4	RPL 121 PDT PN BINTUHAN UTK BIAYA PERKARA	BRI Unit Bandar Bintuhan	S-4880/ MK.5/ 2015	74.000

Bintuhan, Juli 2025

Plt. Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan



Suman Julian, S.E.

NIP. 198410092015011002

Kepada Yth. / To :

RPL 121 PDT PN BINTUHAN UTK BIAYA PERKAR

JALAN MERDEKA BARAT PADANG
KEMPAS,Rt.01/01,KAUR KAB. KAUR SELATAN
KAUR KAB.

Tanggal Laporan : 01/07/25
Statement Date

Periode Transaksi : 01/06/25 - 30/06/25
Transaction Periode

No. Rekening : 568401000089304
Account No

Nama Produk : Giro Tres.NotP
Product Name

Valuta : IDR
Currency

Unit Kerja : UNIT BANDAR BINTUAN MANNA
Business Unit

Alamat Unit Kerja : KANCA MANNA
Business Unit Address KANWIL BANDAR LAMPUNG

Dicetak Oleh : 00179350 - Seftian De
Printed By

Tanggal Transaksi <i>Transaction Date</i>	Uraian Transaksi <i>Transaction Description</i>	Teller <i>User ID</i>	Debet <i>Debit</i>	Kredit <i>Credit</i>	Saldo <i>Balance</i>
03/06/25 14:21:39	BRIVA19845293250600002BRLKROFII	0852583	0.00	135,000.00	343,500.00
03/06/25 15:31:22	BRIVA19845293250600003NBMBNARWIN BRIVA 19845293250600003NBMBNARWIN ESB:NBMB:000CD00P:851213417224	8888186	0.00	135,000.00	478,500.00
04/06/25 13:56:40	BFVA19845293250600004 SYERLY VE:CENAIIDJA 20250604CENAIIDJA01000235756720 ESB:BFST:0008N:2025060444870568	8888691	0.00	165,000.00	643,500.00
10/06/25 14:17:14	BRIVA19845293250600005NBMBMECO APRIANSAH BRIVA 19845293250600005NBMBMECO A ESB:NBMB:000CD00P:854596693678	8888022	0.00	665,000.00	1,308,500.00
13/06/25 14:33:06	BRIVA19845293250600006NBMBHEFFER SATRIA BRIVA 19845293250600006NBMBHEFFER ESB:NBMB:000CD00P:856147390594	8888538	0.00	25,500.00	1,334,000.00
16/06/25 13:39:49	BFST568401000089304LIDYA SYAH F:BDINIDJA 20250616BDINIDJA01000227633211 ESB:BFST:0008N:20250616FASTIDJA01051917536	8888664	0.00	500,000.00	1,834,000.00
17/06/25 11:05:38	BRIVA19845293250600007WBNKROFII BRIVA 19845293250600007WBNKROFII ESB:WBNK:000CD00P:518208011496	0888481	0.00	14,500.00	1,848,500.00
17/06/25 11:07:18	DANA PERKARA PN BINTUHAN ESB:INDS:0002A00W:da09bb059975	5684051	1,800,000.00	0.00	48,500.00
19/06/25 14:48:15	BRIVA19845293250600010WBNKANDRI YUSUDARS BRIVA 19845293250600010WBNKANDRI ESB:WBNK:000CD00P:518293533061	0888475	0.00	25,500.00	74,000.00

Saldo Awal <i>Opening Balance</i>	Total Transaksi Debet <i>Total Debit Transaction</i>	Total Transaksi Kredit <i>Total Credit Transaction</i>	Saldo Akhir <i>Closing Balance</i>
208,500.00	1,800,000.00	1,665,500.00	74,000.00

Terbilang / In Words

TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH
SEVENTY FOUR THOUSAND RUPIAH



Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

--	--

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- *In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account*
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- *The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.*
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- *Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit*

MONITORING PENUTUPAN REKENING SATKER WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
PERIODE 30 JUNI 2025

K/L : (005) Mahkamah Agung
Provinsi/DI : (2600) Bengkulu
UPT Korwil : (576274) Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

No.	Nomor Rekening	Rekening Atas Nama	Nama Bank	Jenis Rekening	Kategori	Tujuan Pembukaan	Izin Pembukaan	Penutupan Rekening	Keterangan
		N	I	H	I	L			

Bintuhan, Juli 2025
Plt. Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan



Suman Julian, S.E.
NIP. 198410092015011002

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Juni 2025

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kot : (26.05) BENGKULU / KAB. KAUR
Satuan Kerja : (672995) PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-005.03.2.672995/2025
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (121) Manna
Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 74.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	208.500,00	2.035.500,00	2.170.000,00	74.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	208.500,00	2.035.500,00	2.170.000,00	74.000,00
B.	BP Selain Kas	208.500,00	2.035.500,00	2.170.000,00	74.000,00
	1. BP PNBP	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
	2. BP DPK	208.500,00	1.665.500,00	1.800.000,00	74.000,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	74.000,00 ^(*)
3.	Jumlah Kas	Rp	74.000,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	74.000,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	74.000,00 ^(*)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	370.000,00 ^(*)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	370.000,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	370.000,00 ^(*)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	370.000,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	370.000,00
3. Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00 karena -
- 2. Selisih Pembukuan (V.3) : 0,00 karena -

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



SUMAN JULIAN

198410092015011002 198410092015011002

KAB. KAUR , 09 Juli 2025

Bendahara Penerimaan



DINNA MUHARROKMAH

198111212012122001 198111212012122001

Hasil Pemeriksaan Kas
Periode Juni 2025

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 74.000,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00027/SSBP/672995/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	74.000,00
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNBP	Rp.	0,00
2. BP DPK	Rp.	74.000,00
3. BP Pajak	Rp.	0,00
4. BP Lainnya	Rp.	0,00
5. Jumlah	Rp.	74.000,00
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	74.000,00
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	74.000,00
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0,00

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	370.000,00
2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0,00
3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	370.000,00
B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	370.000,00
C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0,00

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
0,00 karena -
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)
0,00 karena -

Bendahara Penerimaan



DINNA MUHARROKHMAH
NIP 198111212012122001

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



198410092015011002 198410092015011002

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 672995 (PENGADILAN NEGERI BINTUHAN)

BULAN : JUNI 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	568401000089304	RPL 121 PN BINTUHAN UTK PDT BIAYA PERKARA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - UNIT BANDAR BINTUHAN	30	S-4880/MK.05/2015	10-06-2015	25-06-2025	74,000.00

Bendahara Penerimaan,

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
DINNA MUHARROKHMAH
NIP. 198111212012122001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara
** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 09-07-2025

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	121	672995	2025-06-12	Bendahara Penerimaan	682B17QLV2G9C1BM	425233	IDR	120,000	ADA
					250612013914				
2	121	672995	2025-06-12	Bendahara Penerimaan	CC8186U8F7TSUVKN	425239	IDR	130,000	ADA
					250612014315				
3	121	672995	2025-06-18	Bendahara Penerimaan	E4D3061QVDBM6IEJ	425232	IDR	20,000	ADA
					250618018413				
4	-	-	--	-	EFBFA0NAODTBOHJR	425239	-	100,000	N/A
					250618018348				
TOTAL									-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 198111212012122001 pada 09-07-
2025 03:34:27 WIB.



KONFIRMASI PENERIMAAN

NO	NTB	NTPN BILLINGCODE NTPNRS	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL BUKU	NAMA	BAGAN AKUN SPAN	MATA UANG	NILAI	NILAI EKVIVALEN
1	250618018348	EFBFAQNAODTBOHJR 820250618381947	18-06-2025	18-06-2025	Bendahara Penerimaan	672995.121.425239.00000000.00000000.D0000000001.000000.0.00000.2.0000000.0000000	IDR	100.000	100.000



Transaksi Pajak

Cetak Tanggal 09-07-2025

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL									
									-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Ditetapkan oleh 198111212012122001 pada 09-07-2025 03:34:27 WIB.

pada Yth. / To :

PUL 121 PDT PN BINTUHAN UTK BIAYA PERKARA

KANTOR PEMERDEKA BARAT PADANG
KAMPAS,Rt.01/01,KAUR KAB. KAUR SELATAN
KOTA KURU KAB.

Rekening : 568401000089304
Unit No

Produk : Giro Tres.NotP
Product Name

Valuta : IDR
Currency

Tanggal Laporan : 01/07/25
Statement Date

Periode Transaksi : 01/06/25 - 30/06/25
Transaction Period

Unit Kerja : UNIT BANDAR BINTUAN MANNA
Business Unit

Alamat Unit Kerja : KANCA MANNA
Business Unit Address
KANWIL BANDAR LAMPUNG

Dicetak Oleh : 00179350 - Seftian De
Printed By

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
06/25 14:21:39	BRIVA19845293250600002BRLKROFII	0852583	0.00	135,000.00	✓ 343,500.00
06/25 15:31:22	BRIVA19845293250600003NBMBNARWIN BRIVA 19845293250600003NBMBNARWIN ESB:NBMB:000CD00P:851213417224	8888186	0.00	135,000.00	✓ 478,500.00
06/25 13:56:40	BFVA19845293250600004 SYERLY VE:CENAIDJA 20250604CENAIDJA01000235756720 ESB:BFST:0008N:2025060444870568	8888691	0.00	165,000.00	✓ 643,500.00
06/25 14:17:14	BRIVA19845293250600005NBMBMECO APRIANSAH BRIVA 19845293250600005NBMBMECO A ESB:NBMB:000CD00P:854596693678	8888022	0.00	665,000.00	✓ 1,308,500.00
06/25 14:33:06	BRIVA19845293250600006NBMBHEFFER SATRIA BRIVA 19845293250600006NBMBHEFFER ESB:NBMB:000CD00P:856147390594	8888538	0.00	25,500.00	✓ 1,334,000.00
06/25 13:39:49	BFST568401000089304LIDYA SYAH F:BDINIDJA 20250616BDINIDJA01000227633211 ESB:BFST:0008N:20250616FASTIDJA01051917536	8888664	0.00	500,000.00	✓ 1,834,000.00
06/25 11:05:38	BRIVA19845293250600007WBNKROFII BRIVA 19845293250600007WBNKROFII ESB:WBNK:000CD00P:518208011496	0888481	0.00	14,500.00	✓ 1,848,500.00
06/25 11:07:18	DANA PERKARA PN BINTUHAN ESB:INDS:0002A00W:da09bb059975	5684051	1,800,000.00	0.00	✓ 48,500.00
06/25 14:48:15	BRIVA19845293250600010WBNKANDRI YUSUDARS BRIVA 19845293250600010WBNKANDRI ESB:WBNK:000CD00P:518293533061	0888475	0.00	25,500.00	✓ 74,000.00

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
208,500.00	1,800,000.00	1,665,500.00	74,000.00

Langka / In Words

EMPAT PULUH RIBU RUPIAH
FOURTY FOUR THOUSAND RUPIAH



...ani Dengan Setulus Hati

Biaya materai telah dibayar Lun
Revenue Stamp Pa

--	--

pabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
n the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account

alanan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.

pabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
hould there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250612465303
Tanggal Billing : 12-06-2025 09:35:05
Tanggal Kedaluwarsa : 19-06-2025 23:59:00
Tanggal Bayar : 12-06-2025 09:59:13
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I : Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
Total Disetor : 130.000 (IDR)
Terbilang : Seratus Tiga Puluh Ribu (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 250612014315
NTPN : CC8186U8F7TSUVKN

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN UMUM - PERDATA UMUM - Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/ Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon/Termohon
Kode Akun : 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Jumlah Setoran : 60.000 (IDR)
Keterangan : Relas Panggilan Pertama No 5/Pdt.p/2025/PN Bhn, 5/Pdt.p/2025/PN Bhn, Relas Panggilan ke Penggugat No 2/Pdt.g/2025/PN Bhn, 3/Pdt.g/2025/PN Bhn, Relas Panggilan ke Tergugat 2/Pdt.g/2025/PN Bhn, 3/Pdt.g/2025/PN Bhn

Jenis Setoran : HAK KEPANITERAAN LAINNYA - Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuak di Kepaniteraan di Luar Perkara
Kode Akun : 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Jumlah Setoran : 60.000 (IDR)
Keterangan : Pendaftaran SKBD No 54/SK/HK/5/2025/PN Bhn, 55-56/SK/HK/5/2025/PN Bhn, 57-58/SK/HK/6/2025/PN Bhn, 59/SK/HK/6/2025/PN Bhn

Jenis Setoran : HAK KEPANITERAAN LAINNYA - Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan
Kode Akun : 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Jumlah Setoran : 10.000 (IDR)
Keterangan : Pendaftaran Kuasa Perdata No 5/SK.Pdt/6/2025/PN Bhn



Transaksi Berhasil

Tanggal 12 Juni 2025 | 09:55:35 WIB
Nomor Referensi 855512225350

Sumber Dana	NURUL VIALIZAH 5695 **** * 507
BPN	Penerimaan Negara Bukan Pajak
NTPN	682B17QLV2G9C1 BM
NTB	250612013914
STAN	311539
Tanggal Buku	12 Juni 2025
Kode Billing	820250612467062
Nama Wajib Bayar	Bendahara Penerimaan
Kementerian/ Lembaga	005
Unit Eselon I	03
Satuan Kerja	672995
Nominal	Rp120.000
Biaya Admin	Rp0

Total **Rp120.000**

Struk ini merupakan Bukti Penerimaan Negara
yang sah dan BPN akan dikirimkan melalui
Email.



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250612467062
Tanggal Billing : 12-06-2025 09:45:52
Tanggal Kedaluwarsa : 19-06-2025 23:59:00
Tanggal Bayar : 12-06-2025 09:55:35
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I : Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
Total Disetor : 120.000 (IDR)
Terbilang : Seratus Dua Puluh Ribu (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 250612013914
NTPN : 682B17QLV2G9C1BM

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN UMUM - PERDATA UMUM - Pendaftaran Perkara Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana/Perlawanan/Bantahan pada Pengadilan Negeri
Kode Akun : 425233 - Pendapatan Ongkos Perkara
Jumlah Setoran : 120.000 (IDR)
Keterangan : Pendaftaran Perkara No 5/Pdt .p/2025/PN Bhn, 6/Pdt p/2025/PN Bhn, 2/Pdt.g/2025/PN Bhn, 3/Pdt.g/2025/PN Bhn



Transaksi Berhasil

Tanggal 12 Juni 2025 | 09:59:13 WIB
Nomor Referensi 855513986017

Sumber Dana NURUL VIALIZAH
5695 **** * 507

BPN Penerimaan Negara
Bukan Pajak

NTPN CC8186U8F7TSUV
KN

NTB 250612014315

STAN 311945

Tanggal Buku 12 Juni 2025

Kode Billing 820250612465303

Nama Wajib Bayar Bendahara
Penerimaan

Kementerian/ 005
Lembaga
Unit Eselon I 03

Satuan Kerja 672995

Nominal Rp130.000
Biaya Admin Rp0

Total Rp130.000

Struk ini merupakan Bukti Penerimaan Negara
yang sah dan BPN akan dikirimkan melalui
Email.



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250618381947
Tanggal Billing : 18-06-2025 10:33:36
Tanggal Kedaluwarsa : 25-06-2025 23:59:00
Tanggal Bayar : 18-06-2025 11:00:29
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I : Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
Total Disetor : 100.000 (IDR)
Terbilang : Seratus Ribu (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 250618018348
NTPN : EFBFA0NA0DTBOHJR

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA - PERADILAN UMUM - PERDATA UMUM - Redaksi Putusan/Penetapan
Kode Akun : 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Jumlah Setoran : 30.000 (IDR)
Keterangan : Redaksi Putusan No 1/Pdt.G/2025/PN Bhn, Redaksi Penetapan No 5/Pdt.P/2025/PN Bhn, 6/Pdt.P/PN Bhn

Jenis Setoran : HAK KEPANITERAAN LAINNYA - Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan
Kode Akun : 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Jumlah Setoran : 20.000 (IDR)
Keterangan : salinan Putusan No 1/Pdt.G/2025/PN Bhn, Salinan Penetapan No 6/Pdt.P/PN Bhn

Jenis Setoran : HAK KEPANITERAAN LAINNYA - Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara
Kode Akun : 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Jumlah Setoran : 20.000 (IDR)
Keterangan : SKBD No 60/SK/HK/6/2025/PN Bhn, 61/SK/HK/6/2025/PN Bhn

Jenis Setoran : HAK KEPANITERAAN LAINNYA - Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan
Kode Akun : 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Jumlah Setoran : 30.000 (IDR)
Keterangan : Pendaftaran Surat Kuasa Pidana No 18/SK.Pid/6/2025/PN Bhn, 19/SK.Pid/6/2025/PN Bhn, dan Surat Kuasa Perdata No 6/SK.Pdt/6/2025



Transaksi Berhasil

Tanggal	18 Juni 2025 11:00:29 WIB
Nomor Referensi	858463326690
Sumber Dana	SEPTI TRI WENI 5690 **** * 537
BPN	Penerimaan Negara Bukan Pajak
NTPN	EFBFA0NA0DTBOHJR
NTB	250618018348
STAN	616455
Tanggal Buku	18 Juni 2025
Kode Billing	820250618381947
Nama Wajib Bayar	Bendahara Penerimaan
Kementerian/ Lembaga	005
Unit Eselon I	03
Satuan Kerja	672995
Nominal	Rp100.000
Biaya Admin	Rp0

Total **Rp100.000**

Struk ini merupakan Bukti Penerimaan Negara yang sah dan BPN akan dikirimkan melalui Email.



Mahkamah Agung Republik Indonesia
SIMARI PNB

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250618382803
Tanggal Billing : 18-06-2025 10:35:57
Tanggal Kedaluwarsa : 25-06-2025 23:59:00
Tanggal Bayar : 18-06-2025 11:01:03
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I : Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja : PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
Total Disetor : 20.000 (IDR)
Terbilang : Dua Puluh Ribu (IDR)
Status : Sudah Dibayar
NTB : 250618018413
NTPN : E4D3061QVDBM6IEJ

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : HAK KEPANITERAAN LAINNYA - Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
Kode Akun : 425232 - Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan
Jumlah Setoran : 20.000 (IDR)
Keterangan : Pendapatan Uang Leges No 1/Pdt.G/2025/PN Bhn, 6/Pdt.P/PN Bhn



Transaksi Berhasil

Tanggal 18 Juni 2025 | 11:01:03
WIB

Nomor Referensi 858463596288

Sumber Dana SEPTI TRI WENI
5690 **** * 537

BPN Penerimaan Negara
Bukan Pajak

NTPN E4D3061QVDBM6IEJ

NTB 250618018413

STAN 616522

Tanggal Buku 18 Juni 2025

Kode Billing 820250618382803

Nama Wajib Bendahara Penerimaan
Bayar

Kementerian/ 005
Lembaga

Unit Eselon I 03

Satuan Kerja 672995

Nominal Rp20.000

Biaya Admin Rp0

Total Rp20.000

Struk ini merupakan Bukti Penerimaan Negara
yang sah dan BPN akan dikirimkan melalui Email.

BERITA ACARA REKONSILIASI PNBP
Nomor:05/Kasir-BPN.672995/V/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal 28-5-2025, telah dilakukan rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Negeri Bintuhan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian PNB	Mata Akun Penerimaan	Jumlah Jenis PNB	Tarif	Jumlah PNB yang dipungut	Jumlah PNB yang disetor ke kas negara (berdasarkan realisasi pada SIMAR)	Jumlah PNB yang
a	b	c	d	e	f = d x e	g	h = f -
1	Pendaftaran perkara permohonan	425232	1	30000	30000	30000	-
2	Relas panggilan pertama pemohon	425239	1	10000	10000	10000	-
3	Redaksi penetapan	425239	1	10000	10000	10000	-
4	Salinan penetapan dan putusan	425239	54	500	27000	27000	-
5	Pendaftaran surat kuasa pidana dan perdata	425239	3	10000	10000	30000	-
6	Pendapatan uang meja (leges)	425232	1	10000	10000	10000	-
7	Salinan putusan	425239	10	500	5000	5000	-
8	Redaksi penetapan	425239	1	10000	10000	10000	-
9	Salinan putusan dan penetapan	425239	16	8000	8000	8000	-
10	Pendaftaran SKBD	425239	2	10000	20000	20000	-
11	Pendaftaran surat kuasa pidana dan perdata	425239	3	10000	30000	30000	-
12	Pendapatan uang meja (leges)	425239	3	10000	30000	30000	-

Penjelasan atas PNB yang belum disetor (jika ada):

- 1.-
- 2.-

Hasil rekonsiliasi dilampirkan ke dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja [Nama Pengadilan] kode satker [Kode Satker] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Selisih) akan ditindaklanjuti semua pihak.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Kasir

EFFRIAN JULIZAR
NIP.199007192020121005

Panitera

JUMARDI LISMAN
NIP.198006132006041004



Bendahara Penerimaan

DINNA MUHARROKHMAH
NIP.198111212012122001

Sekretaris

SUMAN JULIAN
NIP.198410092015011002

BERITA ACARA REKONSILIASI PNBP
Nomor:06/Kasir-BPN.672995/VI/2025

Pada hari ini Senin tanggal 30-06-2025 telah dilakukan rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada [Nama Pengadilan] dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian PNB	Mata Akun Penerimaan	Jumlah Jenis PNB	Tarif	Jumlah PNBP dipungut $f = d \times e$	Jumlah PNB yang disetor ke kas negara (berdasarkan realisasi pada SIMARI)	Jumlah belur
a	b	c	d	e	f = d x e	g	h
1	Relas panggilan pertama ke Pengugat dan Tergugat	425239	6	10000	60000	60000	-
2	Pendaftaran SKBD	425239	6	10000	60000	60000	-
3	Pendaftaran kuasa Perdata	425239	1	10000	10000	10000	-
4	Pendaftaran perkara Permohonan dan Gugatan	425233	4	30000	120000	120000	-
5	Redaksi putusan dan penetapan	425239	3	10000	30000	30000	-
6	Salinan putusan dan penetapan	425239	40	500	20000	20000	-
7	Pendaftaran SKBD	425239	2	10000	20000	20000	-
8	Pendaftaran surat kuasa Pidana dan Perdata	425239	3	10000	30000	30000	-
9	Pendapatan uang meja (leges)	425232	2	10000	20000	20000	-

Penjelasan atas PNB yang belum disetor (jika ada):

- 1.
- 2.

Hasil rekonsiliasi dilampirkan ke dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja [Nama Pengadilan] kode satker [Kode Satker] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini. Selisih akan ditindaklanjuti semua pihak.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Kasir

EFFRIAN JULIZAR
NIP.199007192020121005

Panitera

JUMARDI LISMAN
NIP.198006132006041004



Bendahara Penerimaan

DINNA MUHARROKHMAH
NIP.198111212012122001

Sekretaris

SUTAN JULIAN
NIP.198410092015011002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jalan Pengadilan-Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu 38963, www.pn-bintuhan.go.id, pnbhn@pn-bintuhan.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI RPL

Nomor: 006/BPN-RPL GLP.672995/VI/2025

Pada hari Senin tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan Rekonsiliasi Saldo RPL pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bintuhan **periode bulan Mei 2025**.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

II. Rekonsiliasi antara Rekening Koran RPL (Kasir) dengan Buku Pembantu Bank (Bendahara Penerimaan)

No.	Informasi Rekening RPL	Saldo Akhir bulan pada Rekening Koran RPL	Saldo Akhir bulan pada Buku Pembantu Bank	Selisih
1.	No. Rekening: 568401000089304 Nama Rekening: RPL 121 PN BINTUHAN Nama Bank: BRI Unit Bandar Bintuan Manna No. Surat Izin Rekening: S-4880/MK.5/2015	Rp. 208.500	Rp. 208.500	-

Penjelasan atas selisih: -

IV. Rekonsiliasi antara Rekening Koran RPL (Kasir) dengan Buku Besar Akrua
Akun Kas lainnya di Bendahara Penerimaan 11825 (Operator GLP)

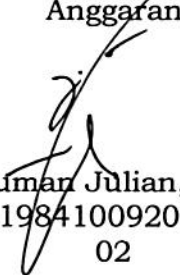
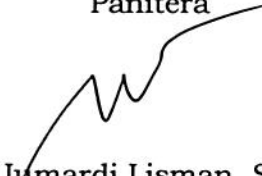
No.	Informasi Rekening RPL	Saldo Akhir bulan pada Rekening Koran RPL	Saldo Akhir bulan pada Buku Besar Akrua Akun Kas lainnya di Bendahara Penerimaan 11825 (Operator GLP)	Selisih
1.	No. Rekening: 568401000089304 Nama Rekening: RPL 121 PN BINTUHAN Nama Bank: BRI Unit Bandar Bintuan Manna No. Surat Izin Rekening: S-4880/MK.5/2015	Rp. 208.500	Rp. 208.500	-

Penjelasan atas selisih: -

Hasil Rekonsiliasi diatas dituangkan dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bintuhan kode Satker 672995 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti semua pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Kasir	Bendahara Penerimaan	Operator GLP
		
Efrian Julizar, A.Md. NIP.1990071920201210 05	Dinna Muharrookhmah NIP.1981112120121220 01	Nurul Fializa, S.Ak. NIP.1998121720220320 09

Kuasa Pengguna Anggaran	Mengetahui,	Panitera
		
Suman Julian, S.E. NIP.1984100920150110 02		Jumardi Lisman, SH. NIP.1980061320060410 04



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jalan Pengadilan-Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu 38963, www.pn-bintuhan.go.id, pnbhn@pn-bintuhan.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI RPL

Nomor: 007/BPN-RPL GLP.672995/VII/2025

Pada hari Selasa tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan Rekonsiliasi Saldo RPL pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bintuhan **periode bulan Juni 2025**.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

III. Rekonsiliasi antara Rekening Koran RPL (Kasir) dengan Buku Pembantu Bank (Bendahara Penerimaan)

No.	Informasi Rekening RPL	Saldo Akhir bulan pada Rekening Koran RPL	Saldo Akhir bulan pada Buku Pembantu Bank	Selisih
1.	No. Rekening: 568401000089304 Nama Rekening: RPL 121 PN BINTUHAN Nama Bank: BRI Unit Bandar Bintuan Manna No. Surat Izin Rekening: S-4880/MK.5/2015	Rp. 74.000	Rp. 74.000	-

Penjelasan atas selisih: -

V. Rekonsiliasi antara Rekening Koran RPL (Kasir) dengan Buku Besar Akrua
Akun Kas lainnya di Bendahara Penerimaan 111825 (Operator GLP)

No.	Informasi Rekening RPL	Saldo Akhir bulan pada Rekening Koran RPL	Saldo Akhir bulan pada Buku Besar Akrua Akun Kas lainnya di Bendahara Penerimaan 111825 (Operator GLP)	Selisih
1.	No. Rekening: 568401000089304 Nama Rekening: RPL 121 PN BINTUHAN Nama Bank: BRI Unit Bandar Bintuan Manna No. Surat Izin Rekening: S-4880/MK.5/2015	Rp. 74.000	Rp. 74.000	-

Penjelasan atas selisih: -

Hasil Rekonsiliasi diatas dituangkan dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bintuhan kode Satker 672995 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti semua pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Kasir

Efrian Julizar, A.Md.
NIP.1990071920201210
05

Bendahara Penerimaan

Dinna Muharookhmah
NIP.1981112120121220
01

Operator GLP

Nurul Fializa, S.Ak.
NIP.1998121720220320
09

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran

Suman Julian, S.E.
NIP.1984100920150110
02



Panitera

Jumardi Lisman, SH.
NIP.1980061320060410
04

LAPORAN KEUANGAN PERKARA BULAN JUNI 2025
PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **tigapuluh** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh lima**, telah dilakukan penutupan sebagai berikut:

Menurut Buku :

I.Buku Induk Keuangan Perkara Perdata

a. Saldo awal bulan Juni 2025	:	959.000,00
b. Penerimaan	:	1.665.500,00
c. Pengeluaran	:	<u>1.575.500,00</u>
Jumlah I	:	1.049.000,00

II.Buku Keuangan Consignatie

a. Saldo awal bulan Juni 2025	:	Nihil
b. Penerimaan	:	Nihil
c. Pengeluaran	:	<u>Nihil</u>
Jumlah II	:	Nihil

III.Buku Keuangan Eksekusi

a. Saldo awal bulan Juni 2025	:	Nihil
b. Penerimaan	:	Nihil
c. Pengeluaran	:	<u>Nihil</u>
Jumlah III	:	Nihil

IV. Saldo pembukuan (I+II+III)	:	1.049.000,00
---------------------------------	---	---------------------

Menurut Kas :

a. Uang Tunai	:	975.000,00
b. Saldo Bank	:	74.000,00
c. Materai	:	<u>-</u>

V.Saldo Kas	:	1.049.000,00
-------------	---	---------------------

VI.Selisih (V-IV)	:	-
-------------------	---	---

Catatan:
Tidak ada selisih.

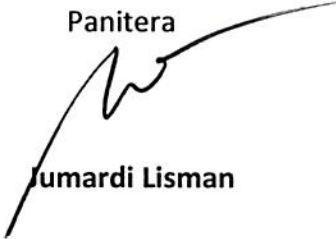
Kasir



Efrian Julizar

Bintuhan, 30 Juni 2025

Panitera



Jumardi Lisman

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan

Rama Wijaya Putra



LAMPIRAN BERITA ACARA LAPORAN KEUANGAN PERKARA
BULAN JUNI 2025

Kas Tunai : Rp975.000,00

Terdiri dari (Perincian) :

Uang Kertas Rp. 100.000,00 : 9 Lembar = Rp900.000,00

Uang Kertas Rp. 50.000,00 : 1 Lembar = Rp50.000,00

Uang Kertas Rp. 20.000,00 : 1 Lembar = Rp20.000,00

Uang Logam Rp. 5.000,00 : 1 Lembar = Rp5.000,00

Rp975.000,00

Materai Rp 0,00 0 lembar = Rp. 0,00

Catatan : -

Kasir



Efrian Julizar

Bintuhan, 30 Juni 2025

Panitera



Jumardi Lisman

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan



Rama Wijaya Putra



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jalan Pengadilan-Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu 38963, www.pn-bintuhan.go.id, pnbhn@pn-bintuhan.go.id

LAPORAN KEUANGAN PERKARA PERDATA
BULAN : JUNI 2025

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	Rp 959.000	
2	Penerimaan Bulan Ini	Rp 1.665.500	
3	Biaya Panggilan		Rp 120.000
4	Biaya Penerjemah		-
5	Biaya Sita		-
6	Biaya Pemeriksaan Setempat		-
7	Biaya Sumpah		-
8	Biaya Pemberitahuan		-
9	Biaya Pengiriman		-
	a. Banding		-
	b. Kasasi		-
	c. PK		-
10	Materai		Rp 30.000
11	Hak-hak Kepaniteraan		Rp 275.500
12	Pengembalian Siasa Panjar Kedua Pihak berperkara		Rp 850.000
13	Biaya Proses/ATK		Rp 300.000
14	Lain-lain		-
	SALDO	-	Rp 1.049.000
	JUMLAH	Rp 2.624.500	Rp 1.575.500

MENGETAHUI
KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Rama Wijaya Putra

Bintuhan, 30 Juni 2025
PANITERA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jumardi Lisman



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jalan Pengadilan-Padang Kempas Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
Provinsi Bengkulu 38963, www.pn-bintuhan.go.id, pnbhn@pn-bintuhan.go.id

LAPORAN KEUANGAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA
BULAN : JUNI 2025

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Awal	-	
2	Penerimaan Bulan Ini	-	-
3	Biaya Pemberitahuan Teguran/Aanmaning	-	-
4	Biaya Penerjemah	-	-
5	Biaya Sita Eksekusi	-	-
6	Biaya Pemeriksaan Setempat/Biaya Transportasi	-	-
7	Biaya Sumpah	-	-
8	Biaya Pemberitahuan Berkas Perkara:	-	-
	a. Banding	-	-
	b. Kasasi	-	-
	c. PK	-	-
9	Biaya Pengiriman Berkas Perkara	-	-
	a. Banding	-	-
	b. Kasasi	-	-
	c. PK	-	-
10	Materai	-	-
11	Redaksi	-	-
12	Hak-hak Kepaniteraan (PNBP)	-	-
13	Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak berperkara	-	-
14	Biaya Proses/ATK	-	-
15	Biaya Saksi	-	-
16	Biaya Jurusita	-	-
17	Penyerahan Berita Acara Eksekusi	-	-
18	Lain-lain	-	-
	SALDO	-	Rp -
	JUMLAH	Rp -	Rp -

MENGETAHUI
KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Rama Wijaya Putra

Bintuhan, 30 Juni 2025
PANITERA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN

Jumardi Lisman

Kepada Yth. / To :

RPL 121 PDT PN BINTUHAN UTK BIAYA PERKAR

JALAN MERDEKA BARAT PADANG
KEMPAS,Rt.01/01,KAUR KAB. KAUR SELATAN
KAUR KAB.

Tanggal Laporan : 01/07/25

Statement Date

Periode Transaksi : 01/06/25 - 30/06/25

Transaction Period

No. Rekening : 568401000089304

Account No

Nama Produk : Giro Tres.NotP

Product Name

Valuta : IDR

Currency

Unit Kerja : UNIT BANDAR BINTUAN MANNA

Business Unit

Alamat Unit Kerja : KANCA MANNA

Business Unit Address

Dicetak Oleh : 00179350 - Seftian De

Printed By

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
03/06/25 14:21:39	BRIVA19845293250600002BRLKROFII	0852583	0.00	135,000.00	343,500.00
03/06/25 15:31:22	BRIVA19845293250600003NBMBNARWIN BRIVA 19845293250600003NBMBNARWIN ESB:NBMB:000CD00P:851213417224	8888186	0.00	135,000.00	478,500.00
04/06/25 13:56:40	BFVA19845293250600004 SYERLY VE:CENAI DJA 20250604CENAI DJA01000235756720 ESB:BFST:0008N:2025060444870568	8888691	0.00	165,000.00	643,500.00
10/06/25 14:17:14	BRIVA19845293250600005NBMBMECO APRIANSAH BRIVA 19845293250600005NBMBMECO A ESB:NBMB:000CD00P:854596693678	8888022	0.00	665,000.00	1,308,500.00
13/06/25 14:33:06	BRIVA19845293250600006NBMBHEFFER SATRIA BRIVA 19845293250600006NBMBHEFFER ESB:NBMB:000CD00P:856147390594	8888538	0.00	25,500.00	1,334,000.00
16/06/25 13:39:49	BFST568401000089304LIDYA SYAH F:BDINIDJA 20250616BDINIDJA01000227633211 ESB:BFST:0008N:20250616FASTIDJA01051917536	8888664	0.00	500,000.00	1,834,000.00
17/06/25 11:05:38	BRIVA19845293250600007WBNKROFII BRIVA 19845293250600007WBNKROFII ESB:WBNK:000CD00P:518208011496	0888481	0.00	14,500.00	1,848,500.00
17/06/25 11:07:18	DANA PERKARA PN BINTUHAN ESB:INDS:0002A00W:da09bb059975	5684051	1,800,000.00	0.00	48,500.00
19/06/25 14:48:15	BRIVA19845293250600010WBNKANDRI YUSUDARS BRIVA 19845293250600010WBNKANDRI ESB:WBNK:000CD00P:518293533061	0888475	0.00	25,500.00	74,000.00

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
208,500.00	1,800,000.00	1,665,500.00	74,000.00

Terbilang / In Words

TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH

SEVENTY FOUR THOUSAND RUPIAH

07/01/2025 08:39:09 AM



KOMDANAS BULAN JUNI 2025

K Edit Biaya Perkara

https://komdanas.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_alphadomainsview=biayaperkara&layout=edit&order_code=672994&temud=137&se=QTVGZPwRvSvWwYtUa7PjWwF4G5tYhVINGZperWmgwWj3NABTut...

BIAYA PERKARA / PANJAR BIAYA PERKARA BULAN JUNI TAHUN 2025

Saldo Awal	959.000,00
Pemeriksaan	1.665.500,00
Biaya Proses/ ATK/ Pemberkasan	300.000,00
Biaya Penggajian	120.000,00
Biaya Penerjemah	0,00
Biaya Penggajian/Pembertahanan	0,00
Biaya Sita	0,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	0,00
Biaya Sampah	0,00
Takut Adu	0,00
Biaya Pengiriman	0,00
Material	30.000,00
PHBP dari Biaya Pendaftaran	120.000,00
PHBP dari Redaksi	30.000,00
PHBP Lain-lain	125.500,00
Pengembalian Sisa Panjar	850.000,00
Biaya Lain-lain	0,00
Jumlah Saldo Akhir	1.049.000,00
Saldo akhir yang disimpan di bank	74.000,00
Saldo akhir yang disimpan di brankas	975.000,00

Catatan/Keterangan Tambahan

Keterangan Manual

K Edit Biaya Perkara

https://komdanas.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_alphadomainsview=biayaperkara&layout=edit&order_code=672994&temud=137&se=QTVGZPwRvSvWwYtUa7PjWwF4G5tYhVINGZperWmgwWj3NABTut...

Saldo Akhir sama dengan saldo yang berada pada bendahara biaya proses/ATK

BIAYA SITA JAMINAN/EKSEKUSI/LELANG BULAN JUNI TAHUN 2025

Saldo Awal	0,00
Pemeriksaan	0,00
Biaya Material	0,00
Biaya Logos	0,00
Biaya Sita Eksekusi	0,00
Biaya Sita Jaminan	0,00
Biaya Pengumuman Lelang/Sitaan	0,00
Biaya Sita Lelang	0,00
Biaya Lelang	0,00
Biaya Takut	0,00
Biaya Penggajian/Pembertahanan	0,00
Biaya Pemeriksaan	0,00
Pengembalian Panjar Biaya Eksekusi	0,00
PHBP	0,00
Biaya Lain-lain	0,00
Jumlah Saldo Akhir	0,00
Saldo akhir yang disimpan di bank	0,00
Saldo akhir yang disimpan di brankas	0,00

Catatan/Keterangan Tambahan

Keterangan Manual

K Biaya Perkara

https://komdanas.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_alphadomainsview=biayaperkara&layout=detail&order_code=672994&temud=137&se=QTVGZPwRvSvWwYtUa7PjWwF4G5tYhVINGZperWmgwWj3NABTut...

BIAYA PERKARA TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel di bawah adalah tabel pelaporan biaya perkara per bulan

adalah data kosong

adalah data yang belum diisi

adalah data yang belum lengkap diisi

adalah data yang sudah lengkap

Tahun Anggaran 2025

Download Biaya Perkara

#	Wilayah	Setor	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des
1.	Bengkulu	PN Banku	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Simulasi Awal Tahun

Update

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : (005) Mahkamah Agung
Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (2600) Bengkulu
Satuan Kerja : (672994) Pengadilan Negeri Bintuhan
No. Dokumen :
Tanggal : 30 Juni 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Koreksi Lainnya

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	154.500	154.500
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		
JUMLAH				154.500	154.500

Uraian :

Dibuat oleh :
Kasubag Umum dan Keuangan

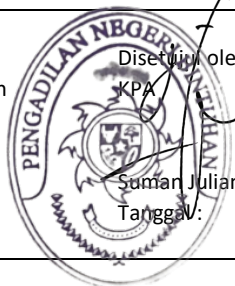
M. Andre Stepanus, SE
Tanggal :

Disetujui oleh :
KPA

Suman Julian, S.E.
Tanggal :

Direkam oleh :
Operator GLP

Nurul Fializah
Tanggal :



DAFTAR REVISI DIPA 03
SATKER PENGADILAN NEGERI BINTUHAN (672995) SEMESTER I
TAHUN 2025

No	Tanggal Revisi	Jenis Revisi
1	14 Februari 2025	Revisi penyesuaian anggaran MA RI TA 2025
2	28 Februari 2025	Permohonan persetujuan izin revisi Halaman III DIPA
3	14 Maret 2025	Revisi buka blokir MA RI TA 2025
4	17 April 2025	Permohonan persetujuan izin revisi Halaman III DIPA
5	16 Mei 2025	Permohonan persetujuan izin revisi Halaman III DIPA

Bintuhan, 30 Juni 2025
Plt Kuasa Pengguna Anggaran



SUMAN JULIAN

**RENCANA TINDAK SATUAN KERJA/KOORDINATOR WILAYAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA/KOORDINATOR
WILAYAH
PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2025**

No.	SATKER	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			RENCANA TINDAK	JADWAL PENYELESAIAN
			I	II	III		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengadilan Negeri Bintuhan	N	I	H	I	L	

Catatan :

- 1 Klasifikasi I : Diisi dengan tanda centang, apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
Klasifikasi II : Diisi dengan tanda centang, apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya.
Klasifikasi III : Diisi dengan tanda centang, apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.
- 2 Format ini berlaku bagi Satker/Korwil yang sudah diperiksa oleh Tim pemeriksa BPK



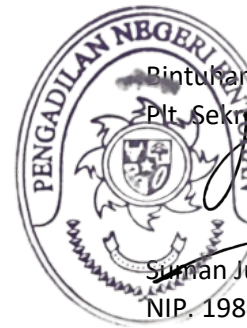
Bintuhan, 7 Juli 2025
Plt. Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan
Suman Julian, S.E.
NIP. 198410092015011002

**MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT SATUAN KERJA/KOORDINATOR WILAYAH
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA/KOORDINATOR WILAYAH
PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2025**

No.	SATKER	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN			RENCANA TINDAK LANJUT(sesuai dengan surat nomor..... 20....)	JADWAL PENYELESAIAN	Progress per 2022	Unit Penanggung Jawab	Keterangan
			I	II	III					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengadilan Negeri Bintuhan	N	I	H	I	L				
2										
3										
4										

Catatan :

1. Klasifikasi I : Diisi dengan tanda centang, apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
Klasifikasi II : Diisi dengan tanda centang, apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya.
Klasifikasi III : Diisi dengan tanda centang, apabila pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.
2. Format ini berlaku bagi Satker/Korwil yang sudah diperiksa oleh Tim pemeriksa BPK



Bintuhan, 7 Juli 2025
Plt. Sekretaris Pengadilan Negeri Bintuhan
Suman Julian, S.E.
NIP. 198410092015011002